

**Implementasi Kebijakan Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia**  
(Implementation Quality Standard System Policy of Indonesian Seafarers)  
(Studi Implementasi SKB 3 Menteri Nomor. KM. 41 Tahun 2003 - Nomor.  
5/U/KB/2003 - Nomor. KEP.208A/MEN/2003 di Prodi Nautika Program Diploma  
Pelayaran Universitas Hang Tuah)

**Sapit Hidayat**

**Jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga, Program Diploma Pelayaran,  
Universitas Hang Tuah Surabaya**

**Abstrak:** Dalam rangka meningkatkan mutu tenaga pelaut Indonesia, maka diupayakan adanya peningkatan mutu lembaga pendidikan dan pelatihan maritim. Penetapan standar minimum lembaga penyelenggara pendidikan dan latihan pelaut, penilaian dilakukan terhadap 4 komponen yang meliputi *Organizational and Staff Resources* (OS), *Infra-provision Teaching Facilities* (ITF), *Competence Education and Training* (Ed), dan *Equipment and Teaching Materials* (Eq). Empat komponen tersebut merupakan bagian dari Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KM. 41 Tahun 2003 - 5/U/KB/2003 - Kep.208A/MEN/2003. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tersebut pada Program Studi Nautika PDP UHT dengan mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan maupun kegagalan. Penelitian ini menggunakan model analisis implementasi kebijakan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), yang mengemukakan permasalahan yang mungkin timbul dalam implementasi sistem standar mutu kepelautan Indonesia, struktur undang-undang maupun non undang-undang, serta tahap-tahap dalam proses implementasi itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SKB 3 Menteri belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan teknis yang meliputi perbedaan standar waktu perkuliahan, serta ketidaksesuaian kualifikasi dosen dan tenaga laboran yang ada dengan kualifikasi yang dipersyaratkan dan minimnya fasilitas pendukung berupa peralatan serta perlengkapan laboratorium. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keterbatasan alokasi sumber daya keuangan merupakan faktor utama pemicu timbulnya permasalahan di atas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pengelolaan sumber daya terutama sumber daya keuangan untuk lebih difokuskan kepada pengadaan peralatan pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan berkelanjutan serta peningkatan dan penyesuaian kualifikasi akademik staf pengajar.

**Kata kunci:** Sistem Standar Mutu Pelaut Indonesia, Implementasi kebijakan

**Abstract:** In order to improve the quality of Indonesian seamen then sought an increase in the quality of maritime education and training institutions. Appropriate setting minimum standards of education and training provider institutions sailors, the assessment carried out on 4 components which includes the *Organizational and Staff Resources* (OS), *Infra-provision Teaching Facilities* (ITF), *Competence Education and Training* (Ed), and the *Equipment and Teaching Materials* (Eq). Four components are part of the Joint Decree of the Minister of Communications, Minister of National Education and Ministry of Manpower and Transmigration No. KM. 41 Tahun 2003-5/U/KB/2003-Kep.208A/MEN/2003. This study aims to determine the policy Implementation Joint Decree (SKB) 3 Minister of the PDP in UHT Nautical Studies Program by identifying the determinants of success or failure. This study uses a model of policy implementation analysis of Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier (1983), which suggests problems that may arise in the implementation of quality standards of seafarer Indonesian system, the structure of law and non law, and the stages in the implementation process itself. The results showed that the implementation of SKB 3 Minister has not done well. This was due to technical problems, including differences in standard time courses, as well as faculty and staff qualification mismatch existing laboratory with the required qualifications and lack of support facilities in the form of equipment and laboratory equipment. From the results of this study concluded that the limited allocation of financial resources is the main factor triggering the emergence of the above problems. To overcome this problem, the necessary management of resources especially financial resources to be more focused on the procurement of educational equipment and a gradual and continuous training and improvement and adjustment of the academic qualifications of teaching staff.

**Keywords:** Indonesian Seafarers Quality Standard System, Implementation of the policy.

**Alamat korespondensi:**

Sapit Hidayat, Program Diploma Pelayaran, Universitas Hang Tuah, Jalan Arif Rahman Hakim 150, Surabaya. e-mail: sapit.hidayat@hangtuah.ac.id

## PENDAHULUAN

Kebutuhan pelaut yang semakin meningkat dalam dunia pelayaran akhir-akhir ini menuntut pemerintah untuk lebih bijaksana dalam menentukan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepelautan.

Dalam Bisnis Indonesia-Jakarta, Pengusaha pelayaran mengungkapkan Indonesia kekurangan pelaut sebanyak 25.000 orang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir seiring dengan tingginya pertumbuhan jumlah armada pelayaran berbendera Merah Putih. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat INSA, Johnson W. Sutjipto mengatakan kebutuhan pelaut nasional sangat besar sejak penerapan asas *Cabotage* yang mengharuskan angkutan domestik menggunakan kapal berbendera Merah Putih dan diawaki oleh warga negara Indonesia. Pertumbuhan permintaan tidak sebanding dengan lulusan yang dicetak oleh sejumlah akademi maritim di Indonesia sehingga kebutuhan pelaut di tanah air tidak terpenuhi. Berdasarkan data INSA, sejak 2005 hingga sekarang telah terjadi penambahan jumlah kapal niaga nasional sebanyak 2.700 unit atau 50,04%, dengan rata-rata kebutuhan pelaut mencapai 10 orang per armada, atau secara nasional membutuhkan 27.000 pelaut. Adapun, Akademi Pelayaran di Indonesia selama ini hanya mampu mencetak sekitar 2.000 pelaut per tahun sehingga terjadi kekurangan sedikitnya 25.000 orang selama 2005-2009. Ketua Bidang Angkutan Air DPP INSA Widihardja Tanudjaja menambahkan proses regenerasi terhadap 135.000 pelaut Indonesia terancam gagal, karena minimnya minat masyarakat menempuh jalur pendidikan pelayaran. Dia menjelaskan jumlah sekolah pelayaran pemerintah yang terdaftar hanya tujuh unit dengan kemampuan meluluskan pelaut paling banyak 200

orang per sekolah. Menurut dia, 50% dari lulusan itu adalah perwira dan sisanya ABK, sedangkan usia berlayar seorang pelaut berkisar 30-35 tahun. Masalahnya, dengan kapasitas sekolah pemerintah, termasuk satu di antaranya milik Pertamina, apakah mampu menggantikan 135.000 pelaut yang aktif saat ini dalam beberapa tahun ke depan. (<http://www.bataviase.co.id>)

Dalam bentuk tabel dapat dilihat untuk kebutuhan pelaut dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut.

**Tabel 1**  
**Kebutuhan Pelaut Dilihat Secara Internasional**

Kebutuhan pada tahun	Kebutuhan Pelaut	Lulusan
1995	387.000	369.000
2000	420.000	404.000
2005	466.000	419.000
2010	481.000	435.000
2015	514.000	443.000

Sumber : BIMCO/ISF 2000 *study by The University of Warwick* diolah oleh peneliti.

Indonesia meratifikasi STCW 1978 amandemen 1985 melalui Peraturan Presiden No.60 tahun 1986 Tentang pengesahan *International Covention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers* (STCW) 1978 amandemen 1985. Maka pemerintah mewajibkan kepada semua sekolah serta lembaga pelatihan kepelautan di Indonesia dalam menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan kepelautan harus sesuai dengan *Quality Standar System* (QSS) yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tenaga pelaut Indonesia, maka diupayakan adanya peningkatan mutu lembaga pendidikan dan pelatihan maritim. Sebagai upaya realisasinya pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan maritim, diantaranya Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 18

Tahun 1997, yang mengatur tentang sistem pendidikan para pelaut, ujian negara dan pesertifikatannya dan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KM. 41 Tahun 2003- 5/U/KB/2003-Kep.208 A/MEN/2003 yang mengatur tentang Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini, hanya akan menganalisis implementasi Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. KM. 41 Tahun 2003- 5/U/KB/2003-Kep.208 A/MEN/2003. Penelitian ini akan membahas Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tersebut.

Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tanggal 11 September 2003 tentang "QSS"- ANNEX A Part 1, menetapkan tentang penilaian minimum standar yang dilakukan terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan (*Maritime Education Training*) terdiri dari 4 sub sistem yaitu; (1) *Organizational and Staff Resources/ Managerial Aspect* (OS), (2) *Infra-provision Teaching Facilities* (ITF), (3) *Competence Education and Training* (ED), (4) *Equipment and Teaching Materials* (EQ). Penelitian ini akan menganalisis implementasi ke 4 sub sistem tersebut secara detail.

Sampai dengan tahun 2009 ada lebih dari 304 lembaga pendidikan dan pelatihan maritim, baik berupa perguruan tinggi, sekolah menengah, maupun kursus-kursus. Sayangnya dari sejumlah lembaga pendidikan dan pelatihan maritim yang ada, tidak semuanya telah mendapatkan *approval* dari Dirjen Perhubungan Laut Republik Indonesia. Hanya sekitar 20 Perguruan Tinggi Maritim yang telah mendapatkan *approval* sedangkan 37

Perguruan Tinggi Maritim sedang mengajukan *approval*. Hal ini apabila diteruskan akibatnya para lulusan dari lembaga pendidikan tersebut tidak memenuhi syarat keahlian pelaut.

**Tabel 2**

**Jumlah Lulusan Program Studi Nautika PDP UHT Tahun 2005 s/d 2009**

Tahun	Jumlah lulusan	Produksi Pelaut Nasional	Persentase terhadap produksi nasional
2005	64	1.406	4,55
2006	33	1.449	2,27
2007	51	1.289	3,95
2008	17	1.330	1,27
2009	5	1.275	0,39

Sumber: Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah, diolah oleh peneliti.

Bertitik tolak pada uraian di atas, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia di Prodi Nautika Program Diploma Pelayaran (PDP) Universitas Hang Tuah?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia di Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah ?

**Penelitian Terdahulu**

Wegig Pratama (2010), Evaluasi Implementasi *Quality Standard System* (QSS) di Akademi Maritim Yogyakarta (AMY). Menggunakan *Discrepancy Model* yang dikembangkan oleh *Malcolm Provus* dengan pendekatan evaluatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang diperkuat dengan analisis kualitatif model *Miles and Huberman*.

**Kebijakan Publik**

Istilah "kebijakan" atau "*policy*" dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor misalnya seorang pejabat pemerintah, pimpinan

suatu kelompok, atau pimpinan suatu lembaga pemerintahan, atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Apapun yang dikerjakan pemerintah merupakan suatu hasil atau output yang berbentuk kebijakan-kebijakan, yang akan dilaksanakan dan dievaluasi. Easton mengingatkan bahwa *public policy* tidak hanya sekedar *output* dari apa yang dilakukan oleh pemerintah tetapi lebih sebagai *outcomes*.

Dengan demikian dapat diartikan kebijakan publik adalah serangkaian instruksi para pembuat keputusan/kebijakan yang menjelaskan tentang tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai suatu tujuan yang dimaksud.

### **Tujuan Kebijakan Publik**

Tujuan kebijakan publik meliputi 4 hal, yaitu : (a) Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator); (b) Melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai perangsang atau stimulator); (c) Menyesuaikan berbagai aktifitas (negara sebagai koordinator); (d) Memperuntukkan dan membagi berbagai materi (negara sebagai pembagi /alokator).

### **Implementasi Kebijakan**

Dalam menganalisis hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pemerintah tentang Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia perlu dikemukakan teori atau konsep tentang implementasi kebijakan.

Kebijakan pemerintah tidak hanya dirumuskan dan diformulasikan kedalam bentuk keputusan, melainkan perlu diwujudkan dalam bentuk implementasi kebijakan, yaitu suatu aktivitas nyata untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan, baik oleh pemerintah, maupun masyarakat.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) makna implementasi

adalah *"to understand what actually happens after a program is enacted or formulated is the subject of policy implementation. Those events and activities that occur after issuing of authoritative public policy directives, which included both the effort to administer and the substantive impacts on people and events"*. Hakekat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman ini mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Anderson (1984) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari 4 (empat) aspek yaitu : *"who is involved in policy implementation, the nature of administrative process, compliance with policy, and the effect of implementation on policy content and impact"* (Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, hakekat dari proses administrasi, kepatuhan kepada kebijakan, dan efek implementasi terhadap dampak dan isi kebijakan).

Dari berbagai pengertian tersebut setidaknya dapat diketahui dan dipahami bahwa implementasi kebijakan menyangkut 3 (tiga) hal yaitu : (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan, (2) adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan (3) adanya hasil kegiatan.

Setiap kebijakan haruslah dilaksanakan dalam waktu yang tepat serta dijaga sehingga tidak terjadi ketidak lancar dalam pelaksanaan itu. Suatu kebijakan yang telah diterima dan disahkan, tidak akan ada artinya apabila tidak dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan itu harus berhasil malahan tidak hanya pelaksanaannya saja yang harus berhasil, akan tetapi tujuan yang terkandung dalam kebijakan itu haruslah tercapai, yaitu terpenuhinya kepentingan masyarakat.

Beberapa ahli menganut pendekatan top down telah menyusun model implementasi kebijakan publik diantaranya : Donald Van Metter dan Carl Van Horn, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, George Edward III serta Meri Lee S. Grindle. Secara ringkas model-model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Model pertama implementasi kebijakan publik model Donald Van Metter dan Carl Van Horn (1975) dengan *a model of the policy implementation*. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah

- 1) Standard kebijakan dan tujuan.
- 2) Sumberdaya.
- 3) Karakteristik lembaga pelaksana.
- 4) Disposisi atau sikap pelaksana.
- 5) Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana.
- 6) Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
- 7) Kinerja atau tingkat pencapaian tujuan

b. Model kedua dikembangkan oleh George C. Edward III (1980) yang dinamakan model implementasi kebijakan publik direct an indirect impact on implementation. Dalam pendekatan ini pada dasarnya terlebih dahulu perlu menjawab 2 pertanyaan yaitu pertama apakah syarat agar implementasi kebijakan berhasil, kedua hambatan – hambatan apa yang dihadapi dalam penerapannya. Untuk menjawab pertanyaan - pertanyaan itu G. Edward III mengidentifikasi 4 (empat) variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:

- 1) Variabel Komunikasi.
- 2) Variabel Sumber daya.

- 3) Variabel disposisi atau sikap pelaksana.
- 4) Variabel struktur birokrasi.

c. Model ketiga dikembangkan oleh MeriLee S. Grindle (1980) *implementation as a political and administrative process*. Model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Adapun isi kebijakan meliputi 6 (enam) hal yaitu:

- 1) Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan;
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan;
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan;
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan;
- 5) Siapa pelaksana program;
- 6) Sumberdaya yang dikerahkan.

Sedangkan konteks implementasinya terdiri dari:

- 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa;
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap.

d. Model keempat diperkenalkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) dengan model kerangka analisis implementasi (*a framework for implementation analysis*). Model ini menjelaskan bahwa peran penting dari implementasi adalah kemampuan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Adapun variabel - variabel tersebut adalah :

- (1) Variabel *independen*, merupakan variabel mudah tidaknya masalah yang akan digarap dan maupun indikator kesukaran-kesukaran teknis, keberagaman perilaku yang diatur, prosentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran, tingkat dan ruang lingkup perubahan

- perilaku yang dikehendaki.
- (2) Variabel *intervening*, merupakan variabel kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat dengan indikator kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai, keterandalan teori kausalitas yang diperlukan, ketetapan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan di antara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana, aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana, kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang dan akses formal pihak-pihak luar.
- (3) Variabel *dependen*, yaitu variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat dan kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

Menurut Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problem*); (2) Karakteristik kebijakan/ undang-undang (*ability of statute implementation*); (3) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

- (1) Karakteristik Masalah :

- (a) Kesulitan teknis masalah.

Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan

mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.

- (b) Keragaman kelompok sasaran.

Ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda.

- (c) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

- (2) Karakteristik kebijakan :

- (a) Kejelasan isi kebijakan.

Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.

- (b) Dukungan teoritis kebijakan.

Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.

- (c) Alokasi sumberdaya keuangan terhadap kebijakan.

Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap

program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan administrasi, serta memonitoring program, semuanya perlu biaya.

(d) Keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.

Kegagalan program sering disebabkan kekurangan koordinasi vertical dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi dasar.

(e) Kejelasan dan konsistensi aturan pada badan pelaksana.

Kejelasan dan konsistensi aturan pada badan dapat mempengaruhi proses implementasi didorong oleh aturan keputusan formal dari lembaga pelaksana. Contoh, kasus ijin atau lisensi dengan mengisi aplikasi, pejabat lembaga disyaratkan konsisten dengan tujuan legal.

(f) Komitmen pejabat terhadap tujuan kebijakan.

Kasus korupsi yang terjadi di Negara-Negara Dunia Ketiga, khususnya di Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen pejabat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program.

(g) Akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relative mendapat dukungan dari pada program yang tidak melibatkan masyarakat.

### (3) Lingkungan kebijakan

(a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat teknologi.

Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif

mudah menerima program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dalam implementasikan dengan bantuan teknologi modern.

(b) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.

Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif, seperti kenaikan harga BBM atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik.

(c) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*).

Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain: kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan; Kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditunjukan kepada badan legislatif.

(d) Komitmen dan keterampilan pejabat implementor.

Pada akhirnya, komitmen pejabat pelaksana untuk

merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. pejabat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

(4) Tahap-Tahap dalam proses implementasi :

(a) Output kebijakan dari badan-badan pelaksana.

Ketika ketidaksesuaian terjadi antara tujuan perundang-undangan dan keputusan kebijakan adalah tidak dapat dielakkan, maka perbedaan dapat dikurangi jika perundang-undangan ditetapkan tidak mendua tujuan. Lembaga pelaksana dan keseluruhan sistem politik menemukan kesulitan mempertahankan untuk periode lama (lebih dari lima tahun), tekanan dan konflik melekat dalam program yang mandatnya secara substansial adalah perubahan perilaku.

(b) Kepatuhan kelompok sasaran terhadap output kebijakan.

Kemungkinan tidak terpenuhi akan terpantau dan dengan penuh berhasil diusut, tersedianya sanksi / hukum yang tidak terpenuhi, sikap kelompok sasaran memusatkan secara fundamental pada legitimasi aturan dan biaya-biaya pemenuhan kelompok sasaran.

(c) Dampak nyata output kebijakan.

Output kebijakan dari lembaga pelaksana konsisten dengan tujuan perundang-undangan, pada akhirnya kelompok sasaran terpenuhi dengan output tersebut, terdapat konflik tidak serius dari output atau dampak perundang-

undangan, pelaksanaan perundang-undangan cukup teori penyebab terkait dengan perubahan perilaku dalam kelompok sasaran dalam mencapai tujuan yang dimandatkan.

(d) Dampak output kebijakan sebagaimana dipersepsi.

Pada umumnya, harapan pada tingginya hubungan antara kecenderungan awal ke arah sebuah perundang-undangan dan persepsi serta evaluasi dampak. Ketidakcocokan teori, aktor yang tidak menyetujui penerimaan dampak dari suatu perundang-undangan akan menimbulkan perbedaan persepsi, seperti : memandang perundang-undangan tidak sah; memandang dampak perundang-undangan tidak konsisten dengan tujuan perundang-undangan atau pertanyaan validitas dari dampak nyata.

(e) Perbaikan mendasar dalam Undang-Undang.

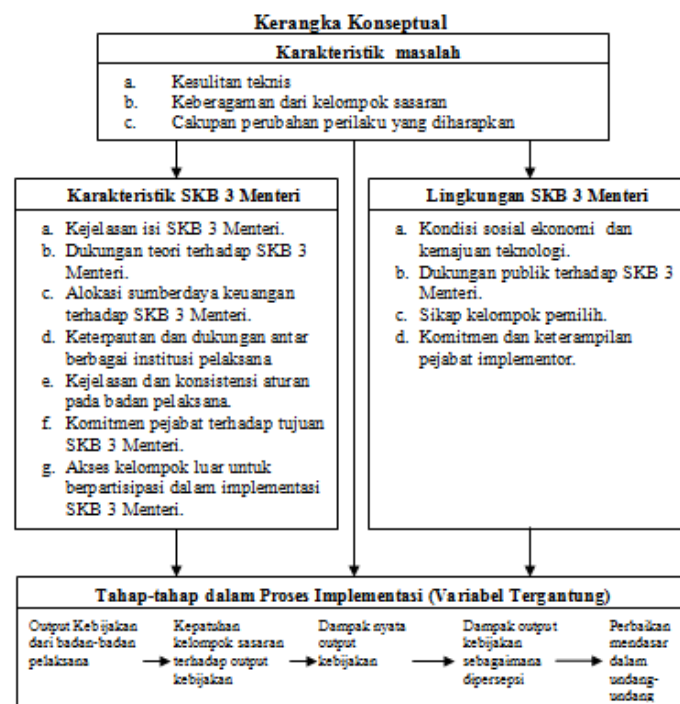
Sejumlah perubahan dan arahan atau usaha perubahan dalam mandat legal dari pejabat pelaksana merupakan fungsi penerimaan dampak kegiatan lembaga yang sebelumnya, perubahan prioritas kebijakan diantara publik dan elit kebijakan sebagai hasil dari perubahan kondisi sosioekonomi, sumber daya politik dari kelompok bersaing, dan posisi strategis mendukung atau melawan pemerintah. Sebuah perundang-undangan seharusnya dipandang sebagai awal dari analisis implementasi, revisi atau merumuskan kembali dari perundang-undangan seharusnya dipandang sebagai tahapan puncak dari proses.



### Surat Keputusan Bersama 3 Menteri

Sehubungan dengan adanya *IMO* (*International Maritime Organization*) *Convention* terhadap *STCW* (*Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers*) untuk pelaut yang diamandemen pada tahun 1995 (*STCW 95*), perwira dek yang bertugas dalam menjaga navigasi pada kapal 500 GT atau lebih yang memungkinkan untuk *ANT III* (Ahli Nautika Tingkat-III) harus memenuhi kompetensi khusus dan konsekuensi pendidikan/pelatihan untuk mencapai kompetensi yang disyaratkan yang mengikuti persyaratan-persyaratan khusus. Persyaratan tersebut tercantum dalam *STCW 95* yang meliputi : (1) organisasi dan SDM dari sebuah lembaga pendidikan/latihan kepelautan (2) ketentuan dasar fasilitas pengajaran, (3) pelatihan keahlian (kualitas dan relevansi pengajaran/pelatihan dan program-program pengujian serta metodologi yang digunakan), (4) peralatan yang

dipersyaratkan untuk pelatihan keahlian. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan-Menteri Pendidikan Nasional-Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KM. 41 Tahun 2003-Nomor 5/U/KB/2003-Kep.208 A/MEN/2003 tentang Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia. Persyaratan Diklat Maritim yang dinilai didasarkan pada standar minimal seperti tercantum dalam ANNEX A – Bagian 1 sampai pada rancangan kerja sistem standar mutu (*Quality Standart System / QSS*) bagi Diklat Maritim di Indonesia yang mana penempatannya berasal dari ketentuan-ketentuan yang saling terkait pada bagian A dan B dari *STCW 1995* dan yang dapat diaplikasikan dari *IMO Model Course* yang terkait. Agar sesuai dengan *STCW 1995*, dengan bentuk yang sama pemberian kode dan singkatan juga digunakan di dalam format pengujian bagi *ANT-III*.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber : (Mazmanian, Daniel A dan Sabatier, Paul A,1983:22 dalam Riant Nugroho, 2009:506)

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Mutu Kepelautan Indonesia di Prodi Nautika Program Diploma Pelayaran (PDP) Universitas Hang Tuah dimaksudkan untuk mengetahui gambaran implementasinya dengan menggunakan pendekatan kualitatif model *Miles and Huberman*.

### Fokus Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pemerintah kaitannya dengan sistem standar mutu kepelautan Indonesia. Secara teoritis, ada tiga variabel yaitu variabel karakteristik dari masalah, variabel karakteristik kebijakan/undang-undang, variabel lingkungan. Ketiga variabel tersebut memiliki indikator yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan. Indikator-indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan :

#### 1. Variabel karakteristik masalah:

##### a. Tingkat kesulitan teknis.

Disatu sisi ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan pangan bagi penduduk atau harga BBM tiba-tiba naik.

##### b. Keberagaman kelompok sasaran.

Suatu program akan lebih mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program berbeda satu dengan lainnya.

##### c. Perubahan perilaku yang diharapkan.

Program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau

bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

#### 2. Variabel karakteristik kebijakan :

##### a. Kejelasan isi kebijakan.

Semakin jelas dan rinci isi kebijakan akan semakin mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi.

##### b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.

Kebijakan yang memiliki dasar teoritis lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.

##### c. Alokasi sumberdaya keuangan terhadap kebijakan tersebut.

Sumberdaya keuangan adalah faktor penting dalam setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf administrasi dan teknis serta memonitor program, yang membutuhkan biaya.

##### d. Keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.

Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horisontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.

##### e. Kejelasan dan konsistensi aturan pada badan pelaksana.

Kejelasan dan konsistensi dari tujuan sebuah perundang-undangan dapat mempengaruhi proses implementasi didorong oleh aturan keputusan formal dari lembaga pelaksana.

f. Komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

Salah satu penyebab timbulnya dan berkembangnya korupsi di negara berkembang seperti Indonesia adalah rendahnya komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program.

g. Akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

Suatu program yang memberi peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing atau tereliminasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.

3. Variabel lingkungan kebijakan:

a. Kondisi sosial ekonomi dan kemajuan teknologi.

Masyarakat yang sudah terbuka dan tingkat pendidikan relatif tinggi akan lebih mudah menerima program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program.

b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.

Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif, seperti kenaikan harga BBM atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik.

c. Sikap kelompok pemilih.

Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi

kebijakan melalui berbagai cara antara lain : (1) Melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan; (2) Mempengaruhi badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.

d. Komitmen dan keterampilan pejabat implementor.

Komitmen pejabat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

4. Tahap-Tahap dalam proses implementasi (Variabel Tergantung) :

a. Output kebijakan dari badan-badan pelaksana.

Ketika ketidaksesuaian terjadi antara tujuan perundangan-undangan dan keputusan kebijakan adalah tidak dapat dielakkan, maka perbedaan dapat dikurangi jika perundangan-undangan ditetapkan tidak mendua tujuan.

b. Kepatuhan kelompok sasaran terhadap output kebijakan.

Kemungkinan tidak terpenuhi akan terpantau dan dengan penuh berhasil diusut, tersedianya sanksi / hukum yang tidak terpenuhi, sikap kelompok sasaran memusatkan secara fundamental pada legitimasi

aturan dan biaya-biaya pemenuhan kelompok sasaran.

c. Dampak nyata output kebijakan.

Output kebijakan dari lembaga pelaksana konsisten dengan tujuan perundang-undangan, pada akhirnya kelompok sasaran terpenuhi dengan output tersebut, terdapat konflik tidak serius dari output atau dampak perundang-undangan, pelaksanaan perundang-undangan cukup teori penyebab terkait dengan perubahan perilaku dalam kelompok sasaran dalam mencapai tujuan yang dimandatkan.

d. Dampak output kebijakan sebagaimana dipersepsi.

Pada umumnya, harapan pada tingginya hubungan antara kecenderungan awal ke arah sebuah perundang-undangan dan persepsi serta evaluasi dampak.

e. Perbaikan mendasar dalam Undang-Undang.

Sejumlah perubahan dan arahan atau usaha perubahan dalam mandat legal dari pejabat pelaksana merupakan fungsi penerimaan dampak kegiatan lembaga yang sebelumnya, perubahan prioritas kebijakan diantara publik dan elit kebijakan sebagai hasil dari perubahan kondisi sosioekonomi, sumber daya politik dari kelompok bersaing, dan posisi strategis mendukung atau melawan pemerintah.

### **Lokasi Penelitian**

Peneliti mengambil lokasi di PDP Universitas Hang Tuah Surabaya, salah satu lembaga pendidikan kepelautan yang telah menerapkan Standar IMO (*International Maritime Organization*) beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim No. 150 Surabaya.

### **Informan**

Informan adalah pihak yang bertindak sebagai pelaksana (*implementor*) kebijakan yaitu pihak PDP Universitas Hang Tuah Surabaya yang terdiri dari Pimpinan (Ketua Jurusan Prodi Nautika) dan Staf Pengajar (dosen).

### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi. Observasi dilakukan untuk mencocokkan informasi awal dari hasil wawancara dengan kenyataan di lapangan sehingga dapat terlihat langsung hal-hal di lapangan yang tidak terungkap dalam wawancara.
2. Wawancara. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang terbuka dan mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan secara tak terstruktur guna menggali pandangan subyek yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah teknik *snowball*
3. Kajian dokumentasi. Kajian dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder. Jenis data sekunder ini adalah datayang diperoleh dari *aggregate* yang dibutuhkan antara lain: data tentang kondisi Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat disusun temuan penelitian. Setelah data dikumpulkan, maka penelitian melakukan serangkaian analisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Agar diperoleh hasil analisis yang memadai maka proses penafsiran data yang dilakukan perlu mendasarkan pada kualitas peneliti dalam melihat hubungan-hubungan yang ada, serta membentuk kesan yang

akurat, berdasarkan pada logika, pertimbangan, wawasan, imajinasi atau intuisinya. Van Dyke (1960).

## PEMBAHASAN

### Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

#### 1. Karakteristik Masalah

##### a. Kesulitan teknis

Berdasarkan hasil penelitian, temuan data kesulitan teknis sebagai berikut:

**Pertama**, masih terdapat dosen dan tenaga laboran yang belum sesuai

kualifikasi dan kompetensi karena belum memiliki ijazah sesuai standar minimal yang dipersyaratkan sehingga perlu dilakukan *upgrading*.

Berdasarkan data pada Tabel 3 masih terdapat 1 orang dosen dan 2 orang tenaga laboran yang belum sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dalam SKB 3 Menteri, dimana seharusnya untuk seorang dosen profesi minimal berkualifikasi ANT II sedangkan untuk tenaga laboran minimal ANT III.

**Tabel 3**  
**Tenaga Dosen, Laboran, Administrasi dan Pustakawan PDP UHT**

Uraian	Kualifikasi Pendidikan						Kesesuaian		
	Ant I	Ant II	Ant III	S2	S1	D III	Yes	No	Jmlh
Dosen	3						3		3
		6					6		6
			1					1	1
				2			2		2
					4		4		4
Laboran			1			2	1	2	3
Administrator					4	2	6		6
Pustakawan						1	1		1

Sumber : Prodi Nautika PDP Univ. Hang Tuah diolah peneliti

**Kedua**, belum dapat diterapkan SKS murni pada kurikulum profesi karena beberapa perbedaan seperti : kurikulum profesi mengacu sistem paket per semester, jumlah jam setiap mata kuliah, waktu (1 SKS = 50 menit untuk Dikti dan 1 jam = 60 menit untuk Profesi), dan jumlah tatap muka untuk kurikulum profesi lebih banyak. Lesson plan dari IMO masih belum terlaksana secara optimal dan belum seluruh dosen dapat melaksanakan perubahan-perubahan kurikulum sesuai kompetensi.

**Ketiga**, Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah belum memiliki ijin keselamatan kerja karena belum menyelenggarakan Diklat secara mandiri tentang BST, MEFA, SCRIB dan AFF yang membutuhkan ijin

keselamatan kerja dari pejabat berwenang.

**Keempat**, Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah belum mempunyai kapal latih khusus. Namun ada kerjasama dengan Distrik Navigasi Klas I dan dilakukan Praktek Layar KRI pada akhir semester IV yang bekerjasama dengan TNI AL

**Kelima**, penelitian dan pengembangan program masih kurang mendapat perhatian, minimnya minat para dosen pada bidang penelitian disebabkan oleh tugas rutin dosen sebagai pengajar dan menempati jabatan struktural. Demikian juga dengan masih minimnya keterlibatan taruna dalam penelitian dan pengembangan karena kegiatan kampus yang sangat padat.

**Keenam,** pada kampus Universitas Hang Tuah belum terdapat fasilitas pendukung berupa Asrama mahasiswa untuk menampung sejumlah taruna yang diterima sebagai peserta didik, selain itu masih terdapat kekurangan yang harus dilengkapi

berupa : AC di ruang laboratorium, alat pemadam kebakaran dan tempat penyimpanan bahan mudah terbakar.

**Ketujuh,** kesulitan dalam memenuhi alat-alat pengajaran umum, berupa *Video Compact Disc*.

**Tabel. 4**  
**VCD sesuai SKB 3 Menteri untuk ANT-III yang belum dimiliki PDP UHT**

<b>Nomor</b>	<b>Description</b>
	<i>Radar video cassettes / VCD IMO (IMO recommendations)</i>
VID 2020	<i>IMO – Safer shipping and cleaner seas</i>
VID 301	<i>Preparing the Defence</i>
X	<i>Ship stability CD-ROM</i>
11	<i>Crude oil washing</i>
13	<i>Interaction</i>
100	<i>Introduction to chemicals tankers</i>
103	<i>Intrdouction to lioquefied gas carriers</i>
116	<i>Operations and maintenance of inert gas system</i>
162	<i>Ro-ro safety and cargo operations</i>
329.1	<i>Chemical tanker operations part 1</i>
387	<i>Dangerous Goods at Sea Series, part 1</i>
387/8	<i>Dangerous Goods at Sea Series</i>
388	<i>Dangerous Goods at Sea Series, part 2</i>
467	<i>Shipping casualty emergency response</i>
481	<i>Reefer container operations</i>
496	<i>Passage planning</i>
498	<i>Master/pilot relationship</i>
506	<i>Operations n maintenance of hatch covers</i>
532	<i>Bulk carrier losses</i>
534	<i>Entering into enclosed spaces</i>
537	<i>The culture gap</i>
544	<i>Loadline survey</i>
545	<i>Safety construction survey</i>
546	<i>Safety equipment survey</i>
574	<i>Search and rescue : co-ordination</i>
575	<i>The ISM audit</i>
591	<i>Prevention and reaction to marine oil spills under MARPOL</i>
598	<i>Cargo loss prevention on bulk carriers</i>
603	<i>Basic instincts</i>
606	<i>Oil pollution regulations and the oil record book</i>
615	<i>Theory of mooring</i>
621	<i>Permit to work</i>
629	<i>STCW &amp; Flag state implementation</i>
636	<i>Ship handling in following seas</i>
644	<i>Man overboard</i>

Sumber : Prodi Nautika PDP UHT diolah peneliti.

Tabel di atas menunjukkan jumlah VCD yang masih harus diusahakan agar Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah dapat melaksanakan mata kuliah profesi yang berhubungan dengan data pada tabel di atas. Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2009 Prodi Nautika baru memiliki 23% dari keseluruhan

VCD yang dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri.

**Kedelapan,** masih minimnya ketersediaan buku referensi (*text book*) pada perpustakaan Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah. Tabel 5 menyajikan data *Text Books* yang belum dimiliki oleh Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah.

**Tabel. 5**  
**Daftar *Text Book* sesuai SKB 3 Menteri untuk ANT-III yang belum dimiliki**

No	Description
	<i>A guide to collision avoidance rules, Cockcroft, 5<sup>th</sup> ed, 1996</i>
	<i>Electronic aids to navigation, Lownsbrough, 1983</i>
	<i>Shipborne radar, Subramaniam</i>
T.1	<i>Admiralty Manual of Navigation, vol 1, HMSO, 1997</i>
T.5	<i>Collision and their causes, Cahil, 1993</i>
T.6	<i>Strandings and their causes, Cahil, 1993</i>
T.8	<i>A guide to collision avoidance rules, Cockcroft, 5<sup>th</sup> ed, 1996</i>
T.10	<i>The theory and practise of seamanship, Danton, 11<sup>th</sup> ed, 1996</i>
T.11	<i>Ship stability of masters and mates, Derret, 4<sup>th</sup> ed, 1984</i>
T.13	<i>Practical navigation for second mates, Frost, 6<sup>th</sup> ed, 1985</i>
T.14	<i>The principles and practice of navigation, Frost, 3<sup>rd</sup> ed, 1988</i>
T.16	<i>The use of constant rate turns</i>
T.19	<i>Maritime Law, Hill, 1998</i>
T.21	<i>The behavior and handling of ship, Hooyer</i>
T.28	<i>Peril at sea an salvage, ICS, 5<sup>th</sup> ed, 1998</i>
T.29	<i>Accident prevention on board ship at sea and in port, ILO, 1996</i>
T.34	<i>Notes on compass work, Kemp, 2<sup>nd</sup> ed, 1972</i>
T.36	<i>Shipboard operations, Lavery, 2<sup>nd</sup> ed, 1996</i>
T.37	<i>Electronic aids to navigation : Radar and Arpa, Lownsbrough, 1<sup>st</sup> ed, 1993</i>
T.41	<i>Tanker operations, A handbook...,Morton, 3<sup>rd</sup> ed, 1992</i>
T.46	<i>Ship magnestism and the magnetic compass, Merrifield</i>
T.57	<i>Bridge team management, a practical guide, swift, 1993</i>
T.60	<i>Electronic aids to navigation, Tetley, 1986</i>
T.62	<i>GPD satellite navigation, Toft, 1987</i>
T.63	<i>Collision regulation fully explained, Wrigth, 2<sup>nd</sup> ed, 1989</i>
T.66**	<i>Introducing on marine engineering</i>
T.69	<i>Guidance and information on bulk cargo loading and discharging to reduce the likelihood of overstressing the hull structure</i>
T.73	<i>Practical navigation, Subamaniam. 2<sup>ed</sup>, 1978</i>
No	Other Description
1	<i>Software Maritime English Laboratory</i>
2	<i>British Admiralty Chart (1 set) and Cataloge</i>

Sumber : Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah diolah peneliti.

**Tabel. 6****Peralatan Jurusan Nautika yang belum dimiliki Prodi Nautika PDP UHT**

No	<i>Navigation Equipment</i>	Kekurangan
1	<i>Magnetic Compass, incl. Binnacle + manual</i>	1
2	<i>Sexant</i>	> 4
3	<i>Tidal stream atlas</i>	1
4	<i>Ruter / triangle atlas</i>	29
5	<i>Chart tables for exercises</i>	4
6	<i>Loran -C receiver</i>	1
7	<i>Automatic pilot</i>	1
8	<i>Gyro Compas</i>	1
9	<i>Gyro Repeater</i>	1
10	<i>Barometer, mercurial</i>	1
11	<i>Radar dan Arpa Simulator</i>	1
12	<i>Floating table, plotting and instruments for each set</i>	2
13	<i>Floating ship stability model for demonstrating movement of center of gravity and free surface effects</i>	1
14	<i>Peta BA (Britiish Admiralty Chart) + Catalogue</i>	1 set
15	<i>Stability Test</i>	1

Sumber : Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah diolah peneliti.

*Text books* di atas merupakan buku yang wajib dimiliki oleh Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah agar dalam penyampaian mata kuliah yang berhubungan dengan data di atas mahasiswa tidak mengalami kesulitan pada saat membutuhkan buku tersebut dan dapat lebih memahami tentang mata kuliah tersebut. Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2009 Prodi Nautika baru memiliki 74% dari *Text Books* yang dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri agar memenuhi standar minimal.

**Kesembilan,** masih terdapat kekurangan peralatan dan perlengkapan laboratorium, berupa

Peralatan tersebut pada Tabel 6 di atas merupakan peralatan dan perlengkapan laboratorium yang sangat penting dalam proses pembelajaran taruna Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah sehingga sangat dituntut dengan segera memiliki peralatan tersebut karena peralatan tersebut merupakan alat praktek yang sangat

diperlukan agar mahasiswa mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri. Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2009 Prodi Nautika baru memiliki 70% dari keseluruhan peralatan laboratorium yang dipersyaratkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri.

**Tabel. 7****Perlengkapan Laboratorium Bahasa yang belum dimiliki PDP UHT**

No	Nama Barang	Keterangan
1	<i>Marlyn Study Pack 1 + Kaset</i>	1 set
2	<i>Marlyn Study Pack 2 + Kaset</i>	1 set
3	<i>English Marlyn Study + Kaset</i>	1 set

Sumber: Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah diolah peneliti.

Perlengkapan laboratorium bahasa tersebut pada Tabel 7 di atas harus dimiliki oleh Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah agar taruna lebih menguasai bahasa Inggris dan mempunyai kompetensi bahasa Inggris seperti yang dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri. Bahasa Inggris wajib dikuasai oleh



seorang pelaut apalagi dengan rute internasional.

b. Keragaman kelompok sasaran

SKB 3 Menteri ini ditujukan hanya kepada lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepelautan pada Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran dan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Prodi Nautika dan Teknika Pelayaran Niaga. Sehingga kelompok sasaran dapat dikatakan homogen.

c. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan

Dari hasil penelitian didapati bahwa kualitas penyelenggaraan pendidikan pada Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah lebih meningkat, sehingga kualitas mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan lebih baik serta lulusan lebih berkualitas dan profesional karena telah sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

2. Karakteristik Kebijakan

a. Kejelasan isi kebijakan

Ditinjau dari isi, SKB 3 Menteri sudah sangat jelas dan terinci dengan sangat detail sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Bersama tersebut.

b. Dukungan teoritis terhadap kebijakan

SKB 3 Menteri tersebut mempunyai cukup dukungan teoritis karena lingkungan implementasinya adalah lembaga pendidikan yang bersentuhan dengan ilmu pengetahuan.

c. Alokasi sumberdaya keuangan terhadap kebijakan

Dihadapkan pada kondisi keterbatasan dana, maka PDP Universitas Hang Tuah berusaha memenuhi komponen standar minimum dalam Surat Keputusan bersama 3 Menteri dengan jalan pengadaan secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas. Pada Tabel 8 disajikan komponen kewajiban taruna Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah.

Berdasarkan data pada Tabel 8 dapat dilihat komponen kewajiban taruna Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah, dimana besaran kewajiban tersebut sangat tergantung pada jumlah taruna yang diterima, dimana dalam setiap Tahun Ajaran Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah hanya mampu menerima maksimal 127 taruna. Sedangkan pada saat ini jumlah taruna aktif Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah sebanyak 173 orang taruna. Dengan perbandingan penerimaan dana, penerimaan maksimal taruna dan jumlah taruna aktif dengan kebutuhan operasional pendidikan secara keseluruhan maka dirasa sangat tidak mungkin mencukupi.

Sebagai gambaran, pada Tabel 9 disajikan jumlah pendapatan dana yang bersumber dari kewajiban taruna PDP Universitas Hang Tuah dan penggunaannya yang disusun dalam Program Kerja dan Anggaran.

**Tabel. 8**  
**Kewajiban taruna Prodi Nautika PDP UHT (Per orang)**

No	Komponen Biaya	Indeks / Nominal
1	Formulir pendaftaran **	250.000
2	SPP *	2.750.000
3	Sumbangan wajib **	3.000.000
4	Sumbangan pembangunan **	1.250.000
5	Kemahasiswaan **	2.500.000
6	Her registrasi *	100.000
7	Ujian Akhir Semester *	250.000

No	Komponen Biaya	Indeks / Nominal
8	Yudisium **	150.000
9	Wisuda **	650.000
* Per Semester ** 1 kali selama menempuh pendidikan. Nominal setiap Tahun Ajaran tidak sama dan cenderung naik		

Sumber : Prodi Nautika PDP Univ. Hang Tuah diolah peneliti.

**Tabel. 9**

**Pendapatan dan Penggunaan dana berdasarkan Prokera PDP UHT**

No	Prokera	Pendapatan	Penggunaan	Sisa
1	2007/2008	589.900.000,-	952.840.000,-	(362.940.000,-)
2	2008/2009	886.075.000,-	1.349.316.400,-	(463.241.400,-)
3	2009/2010	1.641.850.000,-	1.564.561.000,-	77.289.000,-

Sumber : Prodi Nautika PDP Univ. Hang Tuah diolah peneliti

Dapat dilihat bahwa pada Tahun Anggaran 2007/2008 dan 2008/2009 terjadi minus anggaran, sehingga untuk menutupi kekurangan dana tersebut PDP Universitas Hang Tuah harus mendapat subsidi silang dari Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Hang Tuah agar kebutuhan dana yang cukup besar tersebut dapat sedikit tertutupi.

Keterbatasan sumberdaya dana Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah merupakan faktor penghambat utama dalam kesulitan penyediaan sarana prasarana pendukung pendidikan, sehingga merupakan faktor penentu utama dalam implementasi Surat Keputusan Bersama 3 Menteri.

Dengan demikian alokasi sumberdaya keuangan dalam implementasi Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. KM. 41 Tahun 2003 – 5/U/KB/2003 – Kep.208 A/MEN/2003 pada Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah sangat tergantung pada pemasukan dan sisa anggaran Universitas secara keseluruhan yang penggunaannya berdasarkan skala prioritas.

d. Keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana

Hubungan vertikal ini dilakukan antara Komite Nasional Pengawasan

Mutu Kepelautan Indonesia dengan Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah dalam pelaksanaan audit akreditasi. Dalam hubungan ini keterpautan antara PDP Universitas Hang Tuah dengan Komite Nasional Pengawasan Mutu Kepelautan Indonesia sangat mutlak karena kewenangan badan tersebut tidak bisa diwakilkan kepada insitusi diluar Surat Keputusan Bersama 3 Menteri.

Hubungan horizontal yaitu dengan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, Semarang *Growth Center* (SGC), Distrik Navigasi dan Kepanduan serta lembaga penyelenggara pendidikan kepelautan baik negeri maupun swasta lain. Dalam hubungan horizontal ini dapat dilakukan dengan lembaga / institusi yang bisa diaudit oleh Dirjen Perhubungan Laut saja, sehingga kerjasama yang pernah dijalin Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah dengan AAL tidak bisa diteruskan. Berdasarkan uraian di atas bahwa keberhasilan Implementasi Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KM. 41 Tahun 2003- 5 / U / KB / 2003- Kep.208 A / MEN / 2003 dikarenakan terdapat hubungan koodinasi yang bersifat vertikal dan horizontal yang

dilakukan oleh instansi-instansi yang terlibat.

e. Kejelasan dan konsistensi aturan pada badan pelaksana

Sesuai dengan visi PDP Universitas Hang Tuah “Sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan Kelautan / Kemaritiman berstandar International” dan Visi Universitas Hang Tuah yaitu : “Menjadi pemuka dalam Tridarma Perguruan Tinggi yang berdasarkan Pola Ilmiah Pokok Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Kelautan dan atau Kemaritiman” yang juga sejalan dengan maksud dan tujuan berdirinya Yayasan Nala yaitu : “Sebagai peran serta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam pembangunan dibidang pendidikan, sebagai wadah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan pendidikan-pendidikan lain bagi generasi muda / penerus sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

f. Komitmen pejabat terhadap tujuan kebijakan

Komitmen pejabat dalam hal ini Ketua Jurusan Prodi Nautika dan Direktur PDP serta Rektor Universitas Hang Tuah terhadap tujuan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri sangat tinggi. Namun komitmen tinggi ini terkendala oleh sumberdaya keuangan yang masih sangat terbatas.

g. Akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan

Menurut Ibu. Ari Sriantini, ANT II selaku Kajur Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah :

“Kerjasama yang pernah dijalin Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah dengan Akademi Angkatan Laut (AAL) sebagai tempat lahan praktek bagi para taruna tidak bisa diteruskan, hal ini karena AAL merupakan Pihak Ketiga yang sarana dan prasarannya tidak atau belum diaudit oleh

Departemen Perhubungan Republik Indonesia”.

(Sumber : Hasil wawancara tanggal 11 Maret 2011)

Uraian di atas memberikan gambaran tentang akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi Surat Keputusan Bersama 3 Menteri pada lembaga pendidikan dan latihan kepelautan di Indonesia, termasuk Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah.

3. Lingkungan kebijakan

a. Kondisi sosial ekonomi dan kemajuan teknologi

Dalam implementasinya di Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah juga didukung oleh kemajuan teknologi yang digunakan sebagai salah satu pendukung, seperti laboratorium CBT (*Computer Base Training*), laboratorium bahasa dan fasilitas internet sehingga lebih mudah dalam memperoleh dan menerima informasi mengenai pendidikan kepelautan.

Namun demikian, kondisi ekonomi Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah masih berada pada level menengah ke bawah yang juga menentukan dalam implementasi Surat Keputusan Bersama 3 Menteri. Kondisi ekonomi yang masih rendah tersebut berdampak pada besar kecilnya sumber daya keuangan yang dialokasikan dalam implementasi Surat Keputusan Bersama 3 Menteri pada Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah.

b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan

Dukungan publik khususnya *stakeholder* selaku pengguna hasil didik (lulusan) terhadap Surat Keputusan Bersama 3 Menteri cukup besar, yang bermuara pada kualitas hasil didik lembaga pendidikan dan pelatihan pelayaran termasuk Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah dan sesuai dengan harapan serta dapat

diterima bekerja pada kapal niaga rute nasioanl internasional (*ocean going*).

c. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*)

Kelompok pemilih dalam hal ini taruna / mahasiswa yang menempuh pendidikan pada Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah sangat mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah, akan tetapi karena kelompok pemilih merupakan taruna yang tidak mempunyai kekuasaan dan kekuatan baik finansial maupun posisi tawar, sehingga tidak dapat mengintervensi Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah dalam implementasi SKB 3 Menteri baik secara langsung maupun tidak langsung.

d. Komitmen dan keterampilan pejabat implementor

Seluruh pejabat baik Direktur PDP dan Kajor Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah memiliki komitmen tinggi dalam rangka implementasi SKB 3 Menteri di lingkungan Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah, hal ini dapat dilihat dari usaha memenuhi semua komponen dan persyaratan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tersebut secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya keuangan yang ada. Demikian juga keterampilan yang dimiliki Kepala Jurusan Prodi Nautika dan Direktur PDP Universitas Hang Tuah telah sesuai dengan kualifikasi dan keahlian yang dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, dimana Direktur PDP Universitas Hang Tuah adalah seorang Ahli Nautika Tingkat I sedangkan Kepala Jurusan Prodi Nautika Ahli Nautika Tingkat II.

**Tahap-Tahap Proses Implementasi Standar Mutu Kepelautan Indonesia**

**di Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah**

1. Output kebijakan badan-badan pelaksana

Sebagai output kebijakan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri pada PDP Universitas Hang Tuah adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan misi yang diemban yaitu “menghasilkan lulusan sesuai kompetensi standar Surat Keputusan Bersama 3 Menteri dan menghasilkan SDM yang berkualitas dalam IPTEK kelautan dan berperan aktif dalam pembangunan sektor kelautan”. Dalam implementasinya misi tersebut akan selalu mengacu pada persyaratan STCW 95. Dalam STCW 95 kompetensi didasarkan pada 6 fungsi untuk yaitu : (1) Fungsi navigasi pada level operasional, (2) Fungsi penanganan muatan pada level operasional, (3) Fungsi kontrol operasi kapal dan kepedulian terhadap orang-orang di atas kapal pada level operasional, (4) Fungsi permesinan kapal pada level operasional, (5) Fungsi kontrol teknik listrik dan elektronika pada level operasional dan (6) Fungsi perawatan dan perbaikan pada level operasional. Hal ini sejalan dengan tujuan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri.

2. Kepatuhan kelompok sasaran terhadap output kebijakan

Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah selalu patuh dan taat pada output Surat Keputusan Bersama 3 Menteri. Hal ini tercermin dari misi PDP Universitas Hang Tuah yaitu : “Menghasilkan lulusan sesuai kompetensi standar Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang standart mutu pelaut Indonesia dan menghasilkan SDM yang berkualitas dalam IPTEK kelautan dan berperan aktif dalam pembangunan sektor kelautan” serta tujuan PDP Universitas Hang Tuah yaitu “(1) Meningkatkan

dan mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia dalam Keahlian Nautika dan Teknik serta Kepelabuhanan agar dapat lebih berperan dalam Pembangunan Kelautan (2) Menghasilkan lulusan Ahli Nautika Tingkat III, dan Ahli Teknik Tingkat III, yang berkualifikasi Diploma – III, serta memiliki kemampuan profesional sesuai standar kompetensi yang ditentukan oleh negara, dalam hal ini Tingkat Nasional maupun Internasional dan dapat menerapkan serta mengembangkan keahlian dan IPTEK Kelautan yang dimilikinya. (3) Menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang ketatalaksanaan pelayaran niaga sesuai standar nasional maupun internasional. (4) Mewujudkan dan meningkatkan tenaga yang profesional untuk pekerjaan-pekerjaan dibawah air sesuai dengan sertifikat yang diakui tingkat nasional dan internasional”.

### 3. Dampak nyata output kebijakan

Sebagai dampak nyata output Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KM. 41 Tahun 2003- 5/U/KB/2003- Kep.208 A/MEN/2003 pada Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah dapat dilihat dari kualitas lulusan yang menguasai 4 standar kompetensi yaitu : (1) Navigasi, (2) *Cargo Handling*, (3) *Control of the Operation* dan (4) GMDSS (*Global Maritime Distress Safety System*). Selain itu, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut Republik Indonesia telah memberikan Sertifikat Rekomendasi “B” kepada Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah Nomor. B.234 / DL.002 / PDL 2009 tanggal 11 Desember 2009. Rekomendasi “B” mempunyai pengertian “Memenuhi ketentuan

dengan catatan (masih ada kekurangan peralatan yang harus dipenuhi)”

### 4. Dampak output kebijakan sebagaimana dipersepsi

Merupakan persepsi yang ada dan terbangun pada Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah. Output Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KM. 41 Tahun 2003 – 5/U/KB/2003 – Kep. 208 A / MEN / 2003 adalah naiknya kualitas penyelenggaraan pendidikan pada Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah.

Menurut Ibu. Ari Srientini selaku Kepala Jurusan Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah :

“Persepsi kami sehubungan dengan implementasi Surat Keputusan Bersama 3 Menteri adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah yang juga berdampak pada peningkatan kualitas hasil didik kami sehingga para lulusan dapat diterima bekerja pada kapal perusahaan pelayaran niaga baik pada rute nasional maupun internasional (*ocean going*).”

### 5. Perbaikan mendasar dalam undang-undang

Dengan melihat hasil yang telah dicapai dalam proses implementasi Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. KM. 41 Tahun 2003 – 5/U/KB/2003 – Kep.208 A/MEN/2003 pada Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah maka dapat dikatakan masih terdapat kendala dan permasalahan yang timbul, namun kendala dan permasalahan tersebut masih dapat ditemukan solusi pemecahannya sehingga proses implementasi SKB 3 Menteri pada Prodi Nautika PDP Universitas Hang

Tuah dipandang belum perlu dilakukan perubahan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Implementasi Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KM. 41 Tahun 2003 – 5/U/KB/2003 – Kep.208 A/MEN/2003 pada Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah belum sepenuhnya berhasil.

Hal tersebut di atas dapat dilihat dari hasil *self assesment* secara keseluruhan (*overall score*) belum mencapai “*full compliance*” (100% standar minimum), karena sampai dengan saat ini baru mencapai “*substantial compliance*” (8,10) dan Sertifikat Rekomendasi “B” yang dikeluarkan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut Republik Indonesia.

2. Berdasarkan *frame work* yang dipakai, maka faktor yang mempengaruhi kurang berhasilnya implementasi Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tersebut pada Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah, sebagai berikut :

a. Karakteristik masalah, khususnya pada kesulitan teknis :

- 1) Masih terdapat dosen dan tenaga laboran yang belum sesuai kualifikasi dan kompetensi.
- 2) Belum dapat diterapkan SKS murni pada kurikulum profesi karena beberapa perbedaan.
- 3) Belum memiliki ijin keselamatan kerja karena belum menyelenggarakan secara mandiri diklat tentang BST, MEFA, SCRB dan AFF yang membutuhkan ijin keselamatan kerja dari pejabat berwenang.
- 4) Belum mempunyai kapal latih khusus.

- 5) Penelitian dan pengembangan program masih kurang mendapat perhatian.
- 6) Belum terdapat fasilitas pendukung berupa asrama taruna.
- 7) Kesulitan dalam memenuhi alat-alat pengajaran umum, berupa *Video Compact Disc* (VCD).
- 8) Masih minimnya ketersediaan buku referensi (*text book*) pada perpustakaan
- 9) Terdapat kekurangan peralatan serta perlengkapan laboratorium Nautika dan laboratorium Bahasa Inggris.

b. Karakteristik Kebijakan, khususnya pada alokasi sumberdaya keuangan terhadap kebijakan.

Keterbatasan sumberdaya dana Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah merupakan faktor penghambat utama dalam implementasi Surat Keputusan Bersama 3 Menteri.

c. Lingkungan kebijakan, khususnya kondisi sosial ekonomi dan kemajuan teknologi.

Masih lemahnya ekonomi berdampak pada besar kecilnya sumberdaya keuangan yang dialokasikan dalam implementasi Surat Keputusan Bersama 3 Menteri pada Prodi Nautika PDP Universitas Hang Tuah.

### Saran

1. Masalah teknis:

- a. Perlu ditingkatkan pengelolaan sumber daya manusia terutama kemampuan personel dalam memenuhi kualifikasi tenaga pengajar (dosen) dan tenaga laboran dengan merekrut tenaga baru atau menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah seperti Bea Cukai, Distrik Navigasi, PT. Pelindo dan Kepanduan maupun dengan perusahaan-perusahaan pelayaran nasional yang ada.
- b. Perlu dilakukan kajian mata kuliah secara periodik terhadap kompetensi terutama mengantisipasi

teknologi yang begitu cepat sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* dengan jalan dilakukan pembahasan bersama antara Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Perhubungan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan perlu dikaji penerapan sistem paket dengan sistem SKS murni.

c. Memenuhi kekurangan peralatan laboratorium navigasi, buku-buku referensi, VCD dan perlengkapan laboratorium bahasa Inggris, selain dengan jalan yang telah ditempuh selama ini perlu dicoba pengadaan dengan mengajukan proposal kepada pemerintah dalam hal ini kepada Departemen Perhubungan maupun Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

2. Alokasi sumberdaya keuangan. Pengelolaan sumberdaya terutama sumber daya keuangan lebih difokuskan kepada pengadaan peralatan pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan berkelanjutan serta peningkatan dan penyesuaian kualifikasi akademik staf pengajar.

3. Kondisi sosial ekonomi. Secara bertahap dan berkelanjutan meningkatkan kesejahteraan karyawan dan staf pengajar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suriadi. (2009). Inovasi, Media Litbang Provinsi Sumatera Utara, Vol. 6 No. 1, ISSN 1829-8079.
- Damono, Haryo. (2008, April). Pelayaran Indonesia Sebaiknya Biayai Pendidikan Pelaut; Retrieved Nopember 16, 2010 dari <http://nasional.kompas.com/read/2008/04/16/11135355/pelayaran-indonesia>
- Dwidjowijoto, Rian Nugroho. (2007). Analisis Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Edward III George. (1980). *Public Policy Implementing*. London-England: Jai Press Inc.
- Harjanto, Albertus dan Ari Srientini. (2008). Sosialisasi *Quality Standard System*. Universitas Hang Tuah Surabaya.
- Hosio. J.E. (2007). Kebijakan Publik dan Desentralisasi. Yogyakarta: Laksbang.
- Islamy, Irfan. (1994). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 18 Tahun 1997 tentang Pendidikan, Ujian Negara dan Sertifikasi Kepelautan.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- Lilik Ekowanti, Mas Roro. (2004). Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis. Surakarta: Penerbit Pustaka Cakra.
- Mazmanian, Daniel A. and Paul A. Sabatier (1983). *Implementation and Public Policy*. USA, Scott Foresman and Company.
- Merilee S. Grindle. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey. Princenton University Press.
- Moleong, Lexy J. MA. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Moleong. (2006). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- NN (2008, April) Tahun 2010, Dunia kekurangan 46.000 Pelaut; Retrieved Nopember 19, 2010 dari <http://www.jurnalnet.com/konten.php?nama=BeritaUtama&topik=8&id=1647>

- NN (2003,January) 29 Sekolah dan Kursus Pelaut Sesuai Standar; Retrieved Nopember 16, 2010 dari <http://www.focus-access.com/mar/artikel.php?id=6>
- Nugroho, Iwan dan Roehim, Dahuri. (2004). *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan-Menteri Pendidikan Nasional-Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KM. 41 Tahun 2003-Nomor 5/U/KB/2003-Kep.208 A/MEN/2003.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Republik Indonesia Nomor: PY. 67 / 2 / 3 – 01 tentang Pengukuhan Jabatan Bagi Pemilik Sertifikat Keahlian Pelaut Berdasarkan STCW 1978 Amandemen 1995.
- Tulardji. (2009, Desember). *Indonesia Kekurangan 25.000 Pelaut*; Retrieved Nopember 16, 2010 dari <http://bataviase.co.id/detailberita-1037145.html>
- Wegig Pratama. (2010). *Evaluasi Implementasi Quality Standard System (QSS) Berbasis International Maritime Organization (IMO) di Akademi Maritim Yogyakarta (AMY): Program Pascasarjana*, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wiliam N. Dunn (2000). "Pengantar Analisis Kebijakan Publik". Edisi Kedua, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.